

KOMIK

KiTA

(KISAH TRANSFORMASI)





KOMIK

TRANSFORMASI

(KISAH TRANSFORMASI)

MEMPERKENALKAN: TIKA

TIKO

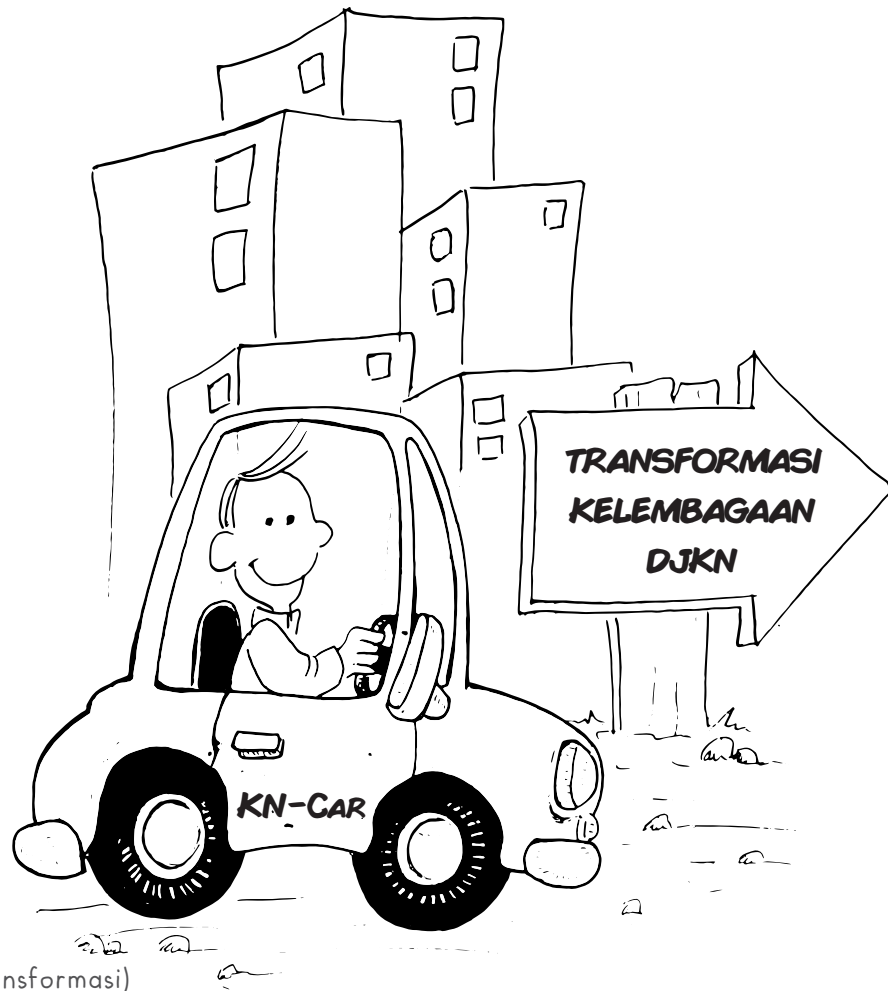
BERSAMA:
PROF. PIMO



**KAMI PERSEMBAHKAN
UNTUK PARA PELAKU PERUBAHAN**

DAFTAR ISI

Sekilas Transformasi Kelembagaan	(5)
Inisiatif Transformasi	(23)
Transformasi Organisasi	(43)
Pengelola Transformasi	(53)



#1

SEKILAS
TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN

Prof,
Sebenarnya
kenapa sih kita
harus bertrans-
formasi?

iya,
kan kemeu
yang sekarang
udah keren?

Kita
sekarang ini
dihadapkan pada
tantangan yang semakin
berat. Mulai tahun 2015, kita
dihadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA), dan pada tahun
2030 Indonesia diprediksi
menjadi 1 dari 7 negara
dengan GDP terbesar di
dunia, lho..

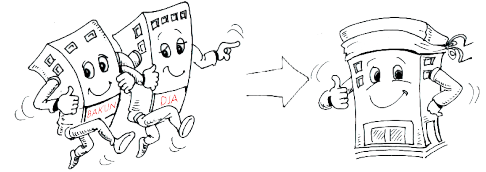
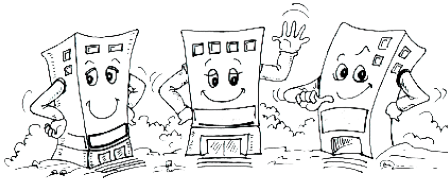
untuk
itu, kita
perlu berbenah
& berubah
mempersiapkan
semuanya.



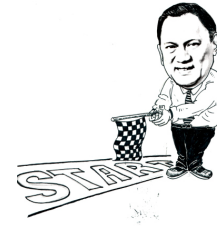
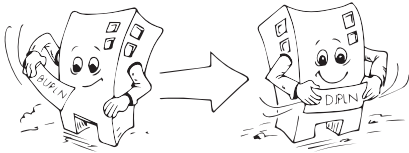
KN'ers..
Sekarang
kita memang harus
berubah..
KN'ers tidak perlu risau
dengan kata perubahan.
Karena, sebenarnya perubahan
ini bukan hal pertama kali kita
hadapi. Bahkan perubahan
itulah yang membuat kita
sekarang semakin
mapan.

Untuk
lebih
jelasnya, mari kita
simak perjalanan
perubahan kita
selama ini.

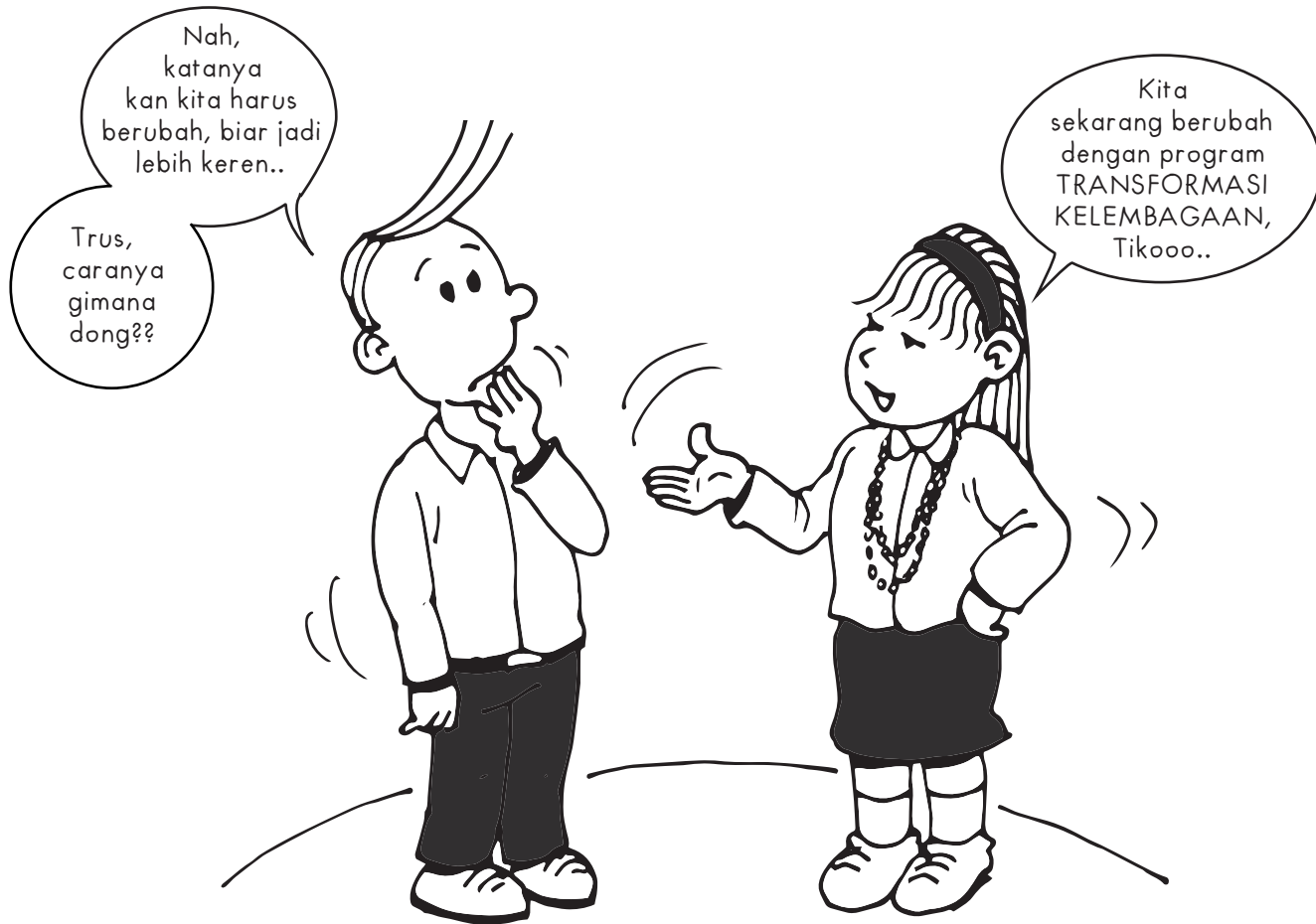
PERJALANAN REFORMASI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA



- reformasi pengelolaan Kekayaan Negara, dimulai dari 3 unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:
 - Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN),
 - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),
 - dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- Ketiga unit inilah yang menjadi embrio DJKN saat ini
- Pada Tahun 2003, Pemerintah melakukan "REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA" yang mengubah paradigma tata kelola Perbendaharaan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004, mengatur kalau "Perbendaharaan Negara" memiliki lingkup yang luas, antara lain meliputi :
 - pengelolaan investasi negara
 - pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah,
 - pengelolaan piutang negara, dan
 - pengelolaan lelang negara, sebagai langkah untuk mendukung penghapusan BMN dan berbagai kepentingan lainnya.
- Perubahan paradigma tata kelola perbendaharaan negara tersebut berdampak pada dilakukannya reorganisasi fungsi perbendaharaan negara.
- Reorganisasi dilakukan dengan melebur Pusat Akuntansi Barang Milik-Kekayaan Negara pada BAKUN, dengan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara pada DJA, ke dalam 3 unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk menjalankan fungsi Pengelolaan Aset Negara.



- Guna mendukung peran Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk melakukan penghapusan BMN dan penagihan Piutang Negara, reorganisasi pun dilakukan di tubuh BUPLN, yang saat itu diperkuat menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
 - Fase transformasi berikutnya, dilakukan pada tahun 2007.
 - Yaitu dengan menggabungkan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada DJPB, dengan fungsi pengelolaan piutang negara dan lelang pada DJPLN, Ke dalam satu unit tunggal pengelola kekayaan negara, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
 - Sejak terbentuknya DJKN, sejarah Reformasi Kekayaan Negara pun dimulai
 - Pada tahun 2013, berbagai inisiatif transformasi kelembagaan digulirkan, yang mengagendakan perubahan secara holistic pada visi, tata kelola organisasi dan proses bisnis Kementerian Keuangan.
- Bersambung :D



Nah,
katanya
kan kita harus
berubah, biar jadi
lebih keren..

Trus,
caranya
gimana
dong??

Kita
sekarang berubah
dengan program
TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN,
Tikooo..

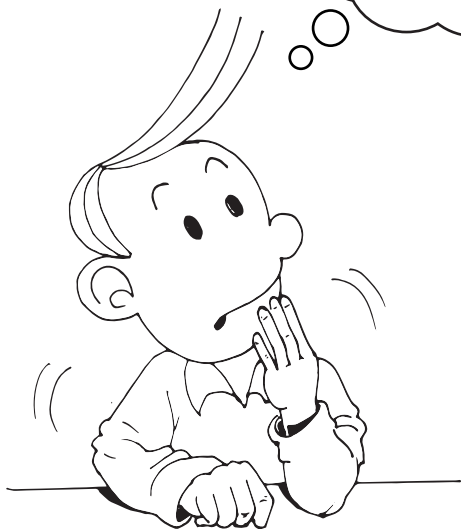
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Penetapan visi baru
Kemenkeu: "Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21"

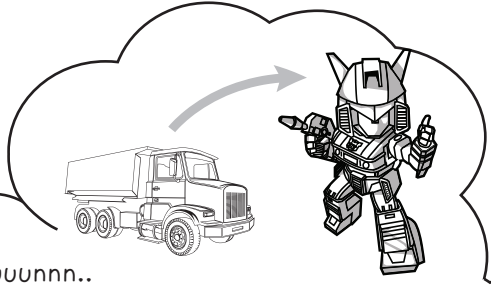
Penetapan 87 Inisiatif Transformasi dan Program Transformasi Organisasi

5 Tema Transformasi:
- Tema Sentral
- Tema Perpajakan;
- Tema Kepabeanaan dan Cukai;
- Tema Penganggaran; dan
- Tema Perbendaharaan

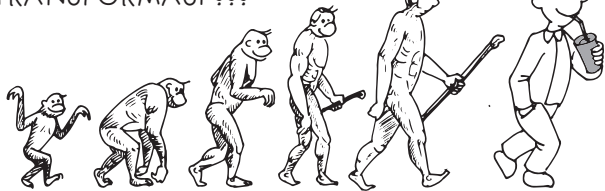




Ampuunnn..
"TRANSFORMASI",
makhluk apaan lagi
sih?!!!!



atau
ini yang namanya
TRANSFORMASI ???





liihhhh, Tiko..
gitu aja gak tau..
Makanya, buka web
Transformasi DJKN
dong..

Yaudah deh,
daripada kamu
bingung, kita bahas
aja yuk...



SIAPAKAH KITA, KN'ERS?

KN'ers, tahukah kalian, kalau organisasi kita ini memiliki peran yang sangat strategis lho dalam pengelolaan aset negara. Ada empat peran utama yang dimiliki DJKN:



Fungsi Strategis:
PENGEMBAN
AMANAT UUD

.....
Sebagai fungsi
koordinator
pengelolaan kekayaan
negara



Kontributor
perekonomian nasional

-
- "Guardian" BUMN
 - Penghasil alternatif PNPB
 - Pengendali Belanja (Pengaman APBN)
 - Pengelola special mission (non core activity)



Aktor Penting
LKPP

-
- Pengelola pos terbesar neraca
 - Pengangkat opini atas LKPP



EMERGING
organization

-
- Organisasi dgn proses bisnis modern
 - Organisasi dengan multitask/skill/spesialisasi

Walaupun organisasi kita ini memiliki peran yang sangat strategis, namun masih terdapat banyak ruang untuk melakukan perbaikan, dan mengembangkan perannya untuk pengelolaan kekayaan negara yang lebih baik.

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DJKN

- 6 Inisiatif Manajemen Aset
- 3 Inisiatif Special Missions
- Transformasi Organisasi

Asset Manager 

Asset Administrator



Dalam fase baru transformasi di Kementerian Keuangan, telah ditetapkan visi baru DJKN, yaitu: “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk dapat mengimplementasikan visi dan misi tersebut, telah diidentifikasi 6 inisiatif manajemen aset, 3 inisiatif special missions, dan program Transformasi Organisasi.

Keenam INISIATIF MANAJEMEN ASET tersebut adalah:

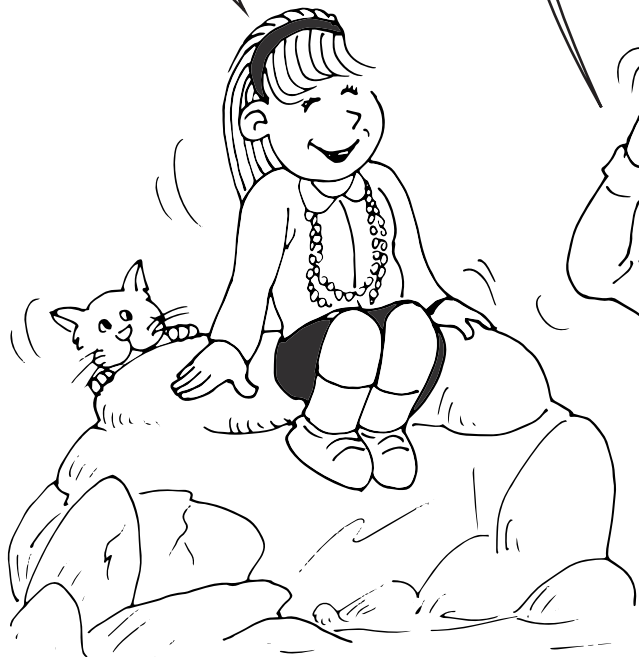
- Inventarisasi & Penilaian SDA.
- Digitalisasi pengelolaan aset.
- Regulasi optimalisasi aset K/L.
- Optimalisasi aset BUN
- Memaksimalkan pemanfaatan dan Return on Asset.
- Kajian portofolio aset setiap tahun.

Sedangkan, yang dimaksud dengan SPECIAL MISSION adalah misi pembangunan yang cakupannya di luar perihal keuangan secara umum. Hal ini merupakan tugas-tugas yang mana manajemen kendalinya berada di dalam secara langsung, namun cakupannya di luar proses anggaran berbasis kinerja yang biasa dilakukan. Berikut merupakan mandat special mission yang dimiliki oleh DJKN (bersama DJPB dan DJPPR):

- Memperjelas strategi dan meningkatkan kinerja perangkat special mission;
- Menerapkan peningkatan tata kelola, pelaporan, dan struktur hukum bagi perangkat special mission;
- Menempatkan proses-proses dengan tepat untuk mengelola perangkat special mission.

Sedangkan, program TRANSFORMASI ORGANISASI menekankan pada perampingan proses bisnis, mempercepat digitalisasi, serta penyusunan struktur organisasi yang lebih fit-for-purpose dan efektif.

Gimana
Tiko, sekarang
udah ngerti
kan Transformasi
Kelembagaan itu
apa?



Ngerti
sih....



dikiitit...
mehehe..

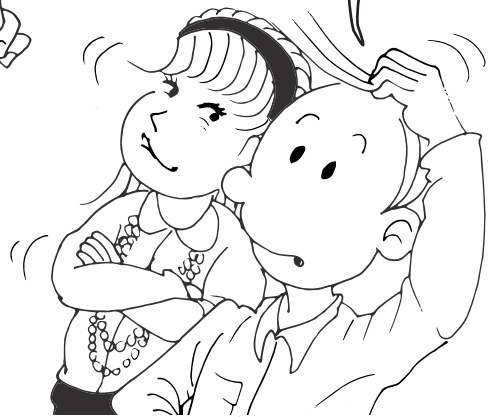


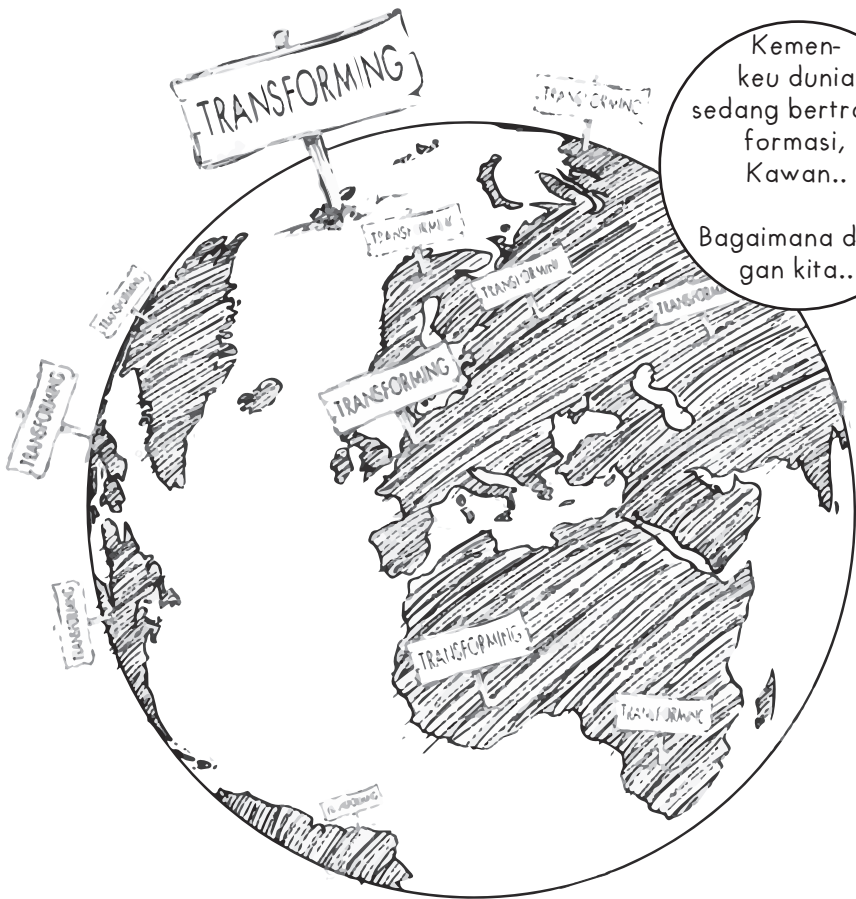
Ho...
ho... hooo....
"TRANSFORMASI"
BERARTI BERUBAH SE-
CARA MEHEYLURUH..
Sehingga, Transformasi Kelem-
bagaan berarti suatu proses
mengubah organisasi dalam
segala aspeknya, seperti struk-
tur organisasi, proses bisnis,
Kompetensi SDM yang
akan berubah secara
holistik



Hmmm...
feelingku mengatakan
akan ada perombakan cara
kerja di kantor secara be-
sar-besaran nih...

Hmmm...
feelingku men-
gatakan akan ada
kenaikan tunjangan
kinerja alias tukin
nih...





Kemen-
keu dunia
sedang bertrans-
formasi,
Kawan..

Bagaimana den-
gan kita..





Tahukah
kamu kalau
sekarang ini, kementerian
keuangan di banyak negara
sedang bertransformasi?

mereka berlomba-lomba
membenahi organisasinya sebagai
upaya untuk menyesuaikan
dengan dinamika perubahan
zaman.



Info Transformasi

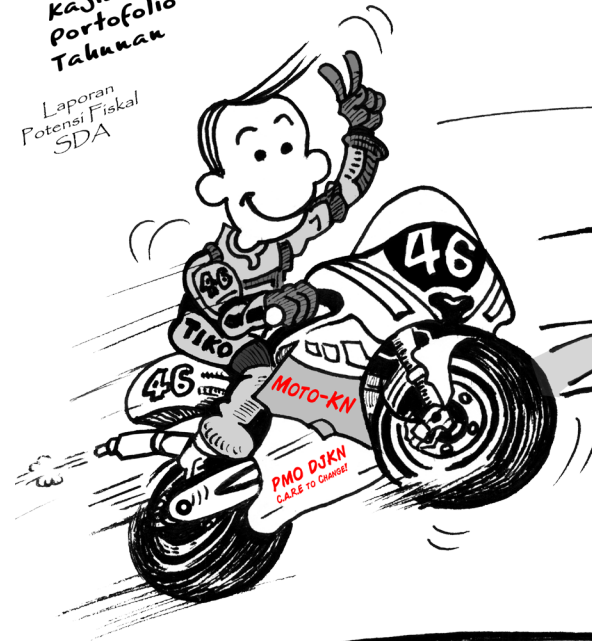
Paling tidak, sudah ada 34
kemenkeu dari berbagai
negara yang saat ini sedang
bertransformasi.

Berikut merupakan negara-negara
yang menjadi aktor perubahan
tersebut:

- Maroko
- Perancis
- Irlandia
- Inggris
- Norwegia
- Belanda
- Denmark
- Swedia
- Polandia
- Afganistan
- Thailand
- Korea Selatan
- Australia
- UEA
- Malaysia
- Qatar
- Israel
- Angola
- Afrika Selatan
- Spanyol
- Austria
- Belgia
- Chile
- Brazil
- Panama
- Meksiko
- USA
- Kanada

Kita harus
gerak cepat, gesit,
dan fokus
menghadapi
Transformasi
Kelembagaan

READY..
GET SET..
AND.....
GO !!!



Laporan
Potensi Fiskal
SDA

Kajian
Portofolio
Tahunan

Modernisasi
Layanan Informasi

SIMAN

SMART

Strategi Pengelolaan Aset

Penagihan
Piutang Negara
Satu Pintu

EWS Kinerja BUMN

Pelaporan
Proses Bisnis
EKS BPPN

ASSET MANAGER

BLU
MANAJEMEN ASET NEGARA

penilaian SDA

Assesment Center

#2

INISIATIF TRANSFORMASI



Prof,
tadi tuh kan
udah disinggung kalo
kita berubah dengan
INISIATIF TRANSFORMASI.
Itu apaan lagi sih
prof??



**INISIATIF
TRANSFORMASI**
adalah serangkaian
tindakan khusus yang
dilakukan untuk mencapai
sasaran strategis yang
berasal dari pernyataan
misi suatu organisasi.

DJKN
mendapatkan
mandat 6 Inisiatif
di Bidang Manajemen
Aset dan 3 Inisiatif
di Bidang Special
Mission.

Biar
paham,
mending kita
bahas satu
persatu ya..

6 INISIATIF MANAJEMEN ASET

- Inventarisasi dan Penilaian SDA.
- Digitalisasi Pengelolaan Aset.
- Regulasi Optimalisasi Aset K/L.
- Optimalisasi Aset BUN.
- Maksimalisasi Manfaat dan Return on Asset.
- Kajian Portofolio Aset Tahunan.

3 INISIATIF SPECIAL MISSIONS

- Memperjelas strategi dan meningkatkan kinerja perangkat special mission;
- Menerapkan tata kelola, pelaporan, dan struktur hukum yang jelas;
- Menempatkan proses-proses yang tepat

* Special Mission didefinisikan sebagai misi pembangunan yang cakupannya di luar perihal keuangan secara umum. Hal ini merupakan tugas-tugas yang mana manajemen kendalinya berada di dalam Kemenkeu secara langsung, namun cakupannya di luar proses anggaran berbasis kinerja yang biasa dilakukan.

Inventarisasi & Penilaian **SDA**

- 
- 2016: Piloting **IP SDA**
 - 2017: **Dasar hukum** IP SDA
 - 2018: 9 **Panduan Penilaian SDA**
 - 2019: **Kapasitas** penilai SDA terbangun
 - 2023: **Neraca SDA** Indonesia
 - 2023: **Laporan Potensi Fiskal SDA**



Capaian
s.d.
Maret
2016

- 4 dari 9 Pedoman Penilaian SDA (Batubara, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Mineral)
- Dirjen KN menjadi anggota Steering Committee WAVES Project

- Capacity Building Penilaian SDA
- DJKN menjadi anggota Forum BIOFIN (Biodiversity Finance Initiatives)

Inisiatif strategis ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kendala dalam upaya untuk optimalisasi penilaian dan inventarisasi kekayaan negara. Pertama, pedoman penilaian Sumber Daya Alam (SDA) dan kapabilitas kementerian/lembaga negara yang belum memadai untuk melakukan inventarisasi SDA. Kedua, hasil audit BPK menemukan adanya masalah atas aset eks BPPN, karena historis proses bisnis yang tidak diketahui.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkanlah beberapa key outcomes yang menjadi acuan pencapaian inisiatif strategis ini, yaitu:

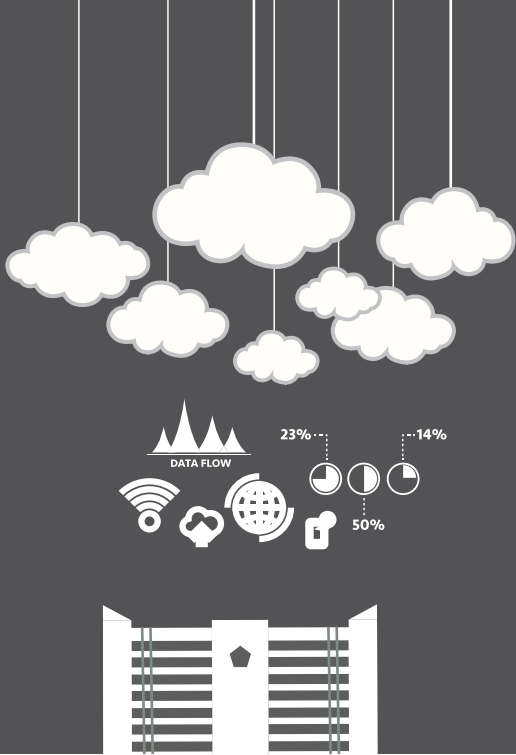
- panduan dibuat untuk semua penilaian keseluruhan SDA;
- kapabilitas penilaian terbangun di Kementerian Keuangan;
- mulai terkonsolidasinya laporan potensi fiskal SDA (Hasil konsolidasi semua sektor)

Sampai dengan akhir tahun 2015, implementasi Inisiatif Strategis 21 secara keseluruhan (whole project) telah mencapai 41%.

Berikut merupakan beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan, diantaranya:

- Penyelesaian 4 dari 9 Pedoman Penilaian SDA (Batubara, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Mineral).
- Dirjen KN menjadi anggota Steering Committee WAVES Project.
- DJKN menjadi anggota Forum BIOFIN (Biodiversity Finance Initiatives).
- Penyelenggaraan beberapa Diklat Penilaian SDA, seperti Minyak Bumi dan Gas.
- melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, serta melakukan benchmark dan kajian dalam upaya untuk membangun sistem pelaporan dan pengolahan data potensi fiskal SDA.

Digitalisasi Pengelolaan Aset



- 2015: **Blueprint TIK** DJKN
- 2016:
 - Implementasi **SIMAN & SMART**
 - Penambahan fungsi **e-Auction**
 - Re-engineering **SIMPLE**
 - Pengembangan **Modul portofolio BMN**
- 2017: Identifikasi & pengembangan **arsitektur IT tambahan**

Capaian
s.d.
Maret
2016

- Penyusunan Blueprint TIK DJKN
- Launching SIMAN oleh Menkeu RI
- Implementasi SIMAN
- Pengembangan & Piloting SMART

Inisiatif strategis ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa data pengelolaan aset dan proses bisnis pengelolaan aset yang dilakukan secara manual, bukan secara digital. Diharapkan ke depannya agar pada setiap tahapan dalam business process pengelolaan aset dapat dilakukan secara digital.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkanlah beberapa key outcomes yang menjadi acuan pencapaian inisiatif strategis ini, yaitu:

- mengimplementasikan SIMAN dengan pendekatan yang bertahap;
- mengimplementasikan SMART dengan pendekatan yang bertahap; dan
- mengembangkan dan mengimplementasikan infrastruktur IT tambahan, jika diperlukan, untuk mendukung pengelolaan aset dan pengelolaan portofolio aktif.

Sampai dengan Tahun 2015, implementasi Inisiatif secara keseluruhan (whole project) telah mencapai 77%.

Berikut merupakan beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan, diantaranya:

- Launching Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) oleh Menteri Keuangan RI pada acara DJKN Digital Day 2015.
- Telah dilakukan sosialisasi dan piloting Aplikasi SIMAN dan SMART.
- Penyusunan dan penyampaian Blueprint TIK DJKN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- Implementasi SIMAN.
- Pengembangan & Piloting SMART.

Regulasi Optimalisasi Aset K/L



- 2014: Regulasi untuk menempatkan **tanggung jawab optimalisasi aset kepada K/L**
- 2015:
 - **Regulasi SBSK** (Standar Barang dan Standar Kebutuhan)
 - **Piloting perencanaan kebutuhan BMN TA 2017 pada 20 K/L**
- 2016: RPMK **Asuransi BMN**

Capaian
s.d.
Maret
2016

- PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD.
- Piloting perencanaan kebutuhan BMN TA 2017 pada 20 K/L

- Terbitnya regulasi Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN.

Inisiatif strategis ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan aset saat ini menempatkan tanggung jawab optimalisasi aset berada di Kemenkeu, bukan K/L. Beberapa ketentuan yang dinilai masih kurang efektif untuk mengoptimalkan nilai guna aset tersebut, diantaranya:

- K/L bertanggung jawab untuk pembelian aset;
- K/L tidak harus melaporkan aset yang tidak termanfaatkan;
- K/L tidak bertanggung jawab untuk aset yang dimilikinya;
- K/L tidak diberikan insentif untuk menghapus aset; dan
- K/L terkadang tidak patuh dengan regulasi pemanfaatan aset yang ada saat ini.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkanlah beberapa key outcomes yang menjadi acuan pencapaian inisiatif strategis ini, yaitu:

- Membuat regulasi untuk menempatkan tanggung jawab optimalisasi aset kepada K/L.
- Membuat panduan baru terkait optimalisasi aset.

Berikut merupakan beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan, diantaranya:

- Terbitnya PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D yang merupakan output utama atas inisiatif 23 ini, antara lain mengatur:
 - penetapan indikator kinerja di bidang pengelolaan BMN pada K/L selaku Pengelola Barang;
 - pengaturan pengelolaan BMN yang melibatkan APIP.
- Telah ditunjuk 20 K/L sebagai piloting perencanaan kebutuhan BMN TA 2017.
- Telah disusun bebetaditetapkan PMK No. 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

Optimalisasi Aset BUN



- 2016:
 - **Panduan** strategi ownership
 - Penyempurnaan **aplikasi & database**
- 2018: Menyempurnakan **regulasi** terkait strategi optimalisasi aset BUN
- 2019: Mulai **implementasi** strategi optimalisasi aset BUN

Capaian

s.d.
Maret
2016

Breakthrough metode pengelolaan aset BUN:

- Program sejuta rumah.
- Penyediaan lahan untuk kawasan industri/investasi.
- Pemanfaatan dan PMN.
- Penetapan Status Penggunaan Aset ke K/L.

Inisiatif strategis ini dilatarbelakangi karena tidak optimalnya pengelolaan jenis aset tertentu yang berada di bawah tanggung jawab Kemenkeu langsung, seperti:

- Kemenkeu tidak diperbolehkan untuk menghapus piutang dari aset eks-BPPN yang mungkin tidak pernah dapat dipiutangkan; dan
- Kemenkeu tidak diperbolehkan untuk menyewakan aset seperti real estate.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkanlah beberapa key outcomes yang menjadi acuan pencapaian inisiatif strategis ini, yaitu:

- Menyempurnakan kebijakan, panduan dan peraturan terkait pengimplementasian strategi.
- Mengimplementasikan strategi pengelolaan aset.

Berikut merupakan beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mengoptimalikan pengelolaan aset BUN, diantaranya:

- Pelaksanaan literature review, benchmarking, serta dengar pendapat dari berbagai narasumber terkait pengelolaan per jenis aset;
- Identifikasi breakthrough untuk metode pengelolaan dibawah pengelolaan Menkeu:
 - Metode pengelolaan aset melalui pemanfaatan dan PMN;
 - Mendukung Penetapan Status Penggunaan Aset ke K/L;
 - Mendukung program sejuta rumah;
 - Mendukung penyediaan lahan untuk kawasan industri/investasi.

Pemanfaatan & Return on Asset



- 2016:
 - Pengelolaan aset **secara aktif** untuk memastikan penggunaan dan **return yang optimal (Operasionalisasi LMAN)**
 - Koordinasi pengelolaan PN satu pintu
- 2018: **Penyusunan peraturan** agar K/L mengelola **piutang negara** secara lebih baik
- 2020: Mengurangi **outstanding & BKPN 50%**

Capaian

s.d.
Maret
2016

- Pembentukan LMAN.
- koordinasi dengan DJP, DJBC, serta Kemendagri terkait upaya pengelolaan PN satu pintu.
- Evaluasi portofolio PN dan mengidentifikasi perbaikan utama

Inisiatif strategis ini dilatarbelakangi karena tidak optimalnya pengelolaan jenis aset tertentu yang berada di bawah tanggung jawab Kemenkeu langsung, seperti:

- Aset, seperti tanah, tidak dikelola secara aktif oleh kemenkeu melalui realokasi ketika aset dikembalikan ke Kemenkeu
- Tidak terdapat badan pengelolaan real estat: Tingkat pengembalian piutang negara yang rendah (15%), Piutang tidak memiliki jaminan yang mencukupi
- Menkeu di beberapa kesempatan menyampaikan arahan agar DJKN dapat menjadi Revenue Center, bahkan ditantang untuk dapat menghasilkan PNBP yang lebih besar dari DJPB.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkanlah beberapa key outcomes yang menjadi acuan pencapaian inisiatif strategis ini, yaitu:

- Menyempurnakan kebijakan, panduan dan peraturan terkait pengimplementasian strategi.
- Mengimplementasikan strategi pengelolaan aset.

Berikut merupakan beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk memaksimalkan tingkat Return on Asset, diantaranya:

- Pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN);
- Pelaksanaan pelatihan berupa magang/intership ke salah satu Departemen di Australia dengan mempelajari dan mempraktekkan Asset Portofolio dan Asset Performance Measurement;
- Pelaksanaan Workshop terkait Asset performance/Asset Portofolio tanggal 23-24 November 2015 di Hotel Lumire, Jakarta (peserta: Dit. BMN, Itjen, Setjen);
- Pelaksanaan koordinasi dengan DJP, DJBC, serta Kemendagri terkait upaya pengelolaan Piutang Negara oleh satu Ditjen (satu pintu);
- Mengevaluasi keseluruhan portofolio piutang negara dan mengidentifikasi perbaikan utama untuk meningkatkan keuntungan dari agunan dan untuk memaksimalkan hasil/perolehan.

Kajian **Portofolio Aset** Tahunan

2016:

- Pengembangan prototype **aplikasi evaluasi portofolio aset**
- Penyempurnaan **peraturan** evaluasi portofolio aset

2018: **Evaluasi secara periodik** atas struktur portofolio aset

2019: **Mengubah struktur portofolio** jika diperlukan dengan menambah atau melakukan divestasi aset

Capaian

s.d.
Maret
2016

- Studi pendahuluan portofolio aset.
- Perumusan awal strategi ownership.
- Koordinasi, dan serta benchmarking terkait strategi ownership.

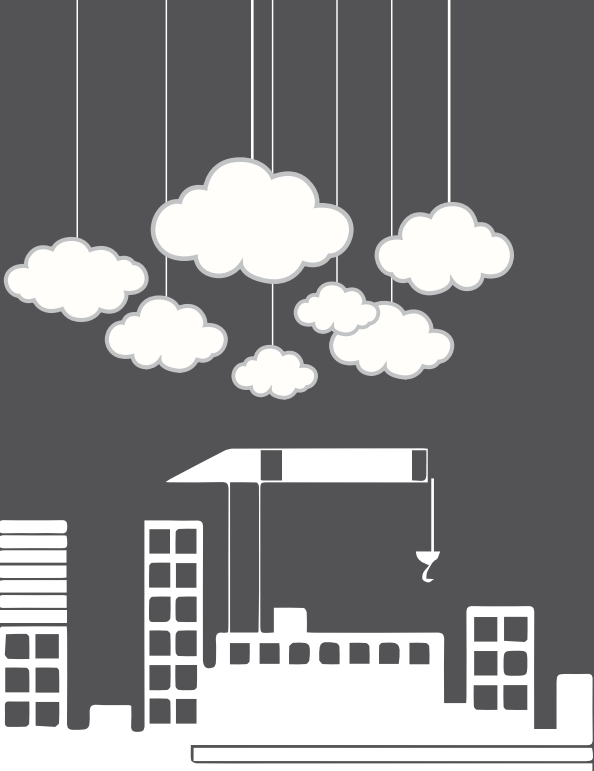
Inisiatif strategis ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya proses untuk mengkaji portofolio aset berdasarkan opportunity cost. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkanlah beberapa key outcomes yang menjadi acuan pencapaian inisiatif strategis ini, yaitu:

- Melakukan evaluasi tahunan struktur portofolio secara keseluruhan.
- Mengubah struktur portofolio jika diperlukan dengan menambah atau melakukan divestasi aset.

Berikut merupakan beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya kajian tahunan portofolio aset negara, diantaranya:

- Membuat studi pendahuluan tentang pentingnya melakukan evaluasi tahunan atas portofolio aset.
- Melakukan perumusan awal strategi ownership.
- Melakukan koordinasi (rapat & FGD), serta benchmarking terkait strategi ownership.

Special Missions



- 2014: Klarifikasi mandat special missions
- 2015:
 - Kajian kebijakan yang mengatur special missions vehicle
 - Kajian penyempurnaan tata kelola special missions
- 2016:
 - **KMK Komite Kinerja** Special Missions
 - **Monitoring kinerja** Special Missions Vehicle

Capaian
s.d.
Maret
2016

- Klarifikasi mandat special mission
- Menetapkan target dan tujuan /IKU SMV

- RKMK terkait pengelolaan kinerja SMV dan pembentukan komite kinerja special mission.

Special missions Kemenkeu didefinisikan sebagai misi pembangunan yang cakupannya di luar perihal keuangan secara umum. Hal ini merupakan tugas-tugas yang mana manajemen kendalinya berada di dalam Kemenkeu seperti memiliki peran mempengaruhi strategi dan IKU secara langsung di mana cakupannya di luar proses anggaran berbasis kinerja yang biasa dilakukan.

Berdasarkan Blue Print Transformasi Kelembagaan, pada tahun 2025, Kemenkeu akan memiliki unit special mission yang efektif dan terkoordinasi yang memenuhi mandat unit masing-masing dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan hal tersebut, DJKN bersama DJPB diberikan amanat untuk mengimplementasikan tiga inisiatif strategis terkait special missions, yaitu:

- Memperjelas strategi dan meningkatkan kinerja perangkat special mission;
- Menerapkan peningkatan tata kelola, pelaporan, dan struktur hukum bagi perangkat special mission;
- Menempatkan proses-proses dengan tepat untuk mengelola perangkat special mission.

Inisiatif ini dikoordinasikan oleh CTO dan melibatkan DJKN, DJPB, DJPPR serta BKF.

Berikut merupakan beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh tim selama Tahun 2015, yaitu:

- Melakukan pembahasan dengan special mission vehicles (SMV) atas klarifikasi mandat dan penyempurnaan tata kelola special mission (melalui rapat dan minilab).
- Menyusun rancangan KMK terkait pengelolaan kinerja special mission vehicles dan pembentukan komite kinerja special mission.
- Pembahasan rencana penyempurnaan tata kelola special mission.
- Penyusunan kajian penyempurnaan struktur tata kelola special mission.
- Pembahasan rencana transisi organisasi untuk penyempurnaan tata kelola special mission.



Info Transformasi

Sampai saat ini beberapa output besar telah dicapai oleh DJKN dalam proses transformasinya, beberapa diantaranya:

- peluncuran Aplikasi SIMAN dan SMART sebagai wujud proses digitalisasi pengelolaan kekayaan negara;
- penerbitan PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD yang salah satu misinya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN oleh K/L selaku pengguna barang;
- pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Keberadaan LMAN yang dedicated mengelola aset idle dan aset potensi yang ada di Pengelola Barang dipandang tepat karena di satu sisi mempunyai fleksibilitas dalam pengelolannya, dan di sisi lain, mandat publik terhadap aset tersebut tetap melekat.

Menteri Keuangan dalam beberapa kesempatan telah memberikan arahan agar DJKN, kedepannya, dapat menjadi revenue center dari hasil pengelolaan aset.

Kalian tahu kan: SIMAN, SMART, LMAN, PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD?

Ternyata itu semua adalah hasil dari program **TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DJKN** lho...

Kece kaaan....



Penyempurnaan
Strategi
Pengelolaan Aset

Panduan
Penilaian SDA

e-Auction

Laporan
Potensi Fiskal
SDA
(hasil konsolidasi semua
sektor)

Pelaporan
Proses Bisnis
Eks-BPPN

Implementasi
SIMAN

Pergeseran peran dari aset
administrator menjadi

**ASSET
MANAGER
EWS**
(Early Warning System)

Struktur tata kelola baru terkait
special missions

Regulasi:
Menempatkan
tanggung jawab
optimalisasi aset
kepada K/L

Implementasi
SMART

Pembentukan
LMAN
(Lembaga
Manajemen
Aset Negara)



BERUBAH
Jadi
"SAILORMOON",
biar **SLIM, GESIT, &**
COOL..
yeady..

BERUBAH
jadi "FLASH",
biar **KUAT, CEPAT, &**
HEROIK...



#3

TRANSFORMASI ORGANISASI

Bagaimana
suh peran
DJKN dalam
Transformasi
Kelembagaan
Kementerian
Keuangan?



**Tema
Pajak**
Melibatkan DJP



**Tema
Bea & Cukai**
Melibatkan DJBC



**Tema
Penganggaran**
Melibatkan DJPK



**Tema
Sentral**
Melibatkan Sekretariat
Jenderal Kemenkeu
dan unit lainnya



Tema Perbendaharaan

Melibatkan DJPB,
DJKN, dan DJPPR

“Diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, intinya bahwa pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah termasuk dalam lingkup Perbendaharaan Negara”





Info Transformasi

Sebagaimana telah dijelaskan, DJKN tergabung dalam Tema Perbendaharaan (bersama DJPB dan DJPPR).

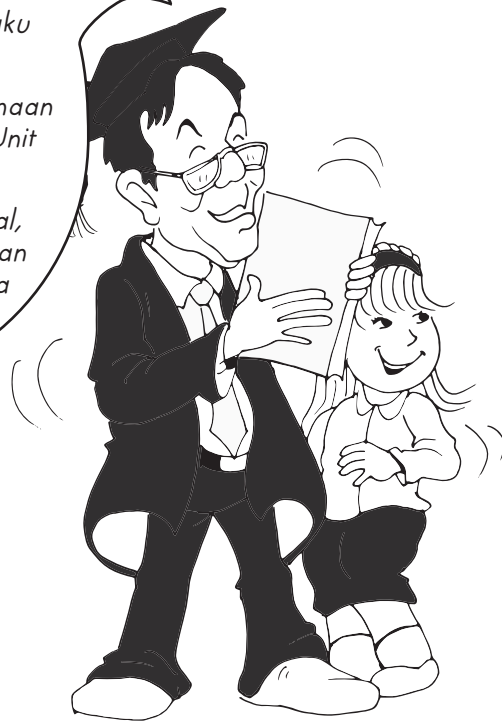
Hal ini mengingatkan bahwa baik DJPB, DJKN, maupun DJPPR menjalankan fungsi yang sama, yaitu Perbendaharaan Negara. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004 mengatur bahwa pada intinya perbendaharaan negara termasuk diantaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan.

Sehingga, pembagian tema tersebut didasarkan pada kesamaan fungsi dan stakeholder yang dilayani oleh ketiga unit eselon I tersebut.

Adalah amanat
Undang-Undang No. 1
Tahun 2014, bahwa lingkup
tugas Menteri Keuangan selaku
BUN sangat luas.

Hingga tahun 2015 ini, pelaksanaan
tugas tersebut tersebar di 3 Unit
Eselon 1 Kemenkeu.

Kelak, di level kantor vertikal,
ketiga unit ini akan melakukan
pelayanan secara bersama
& terintegrasi dalam
satu atap.

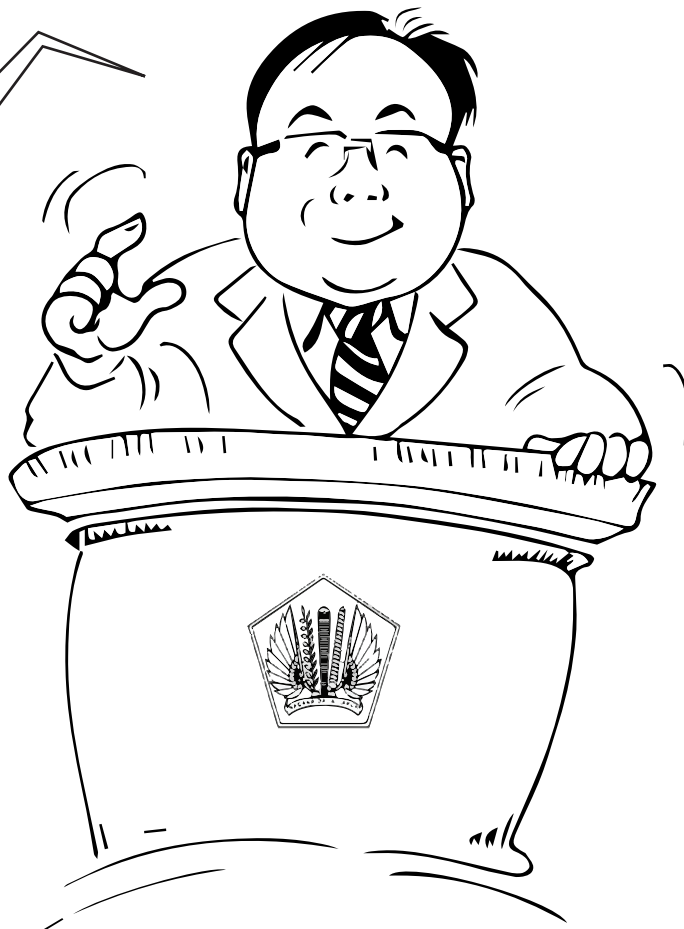


Hidup
3 in 1
hahaay...

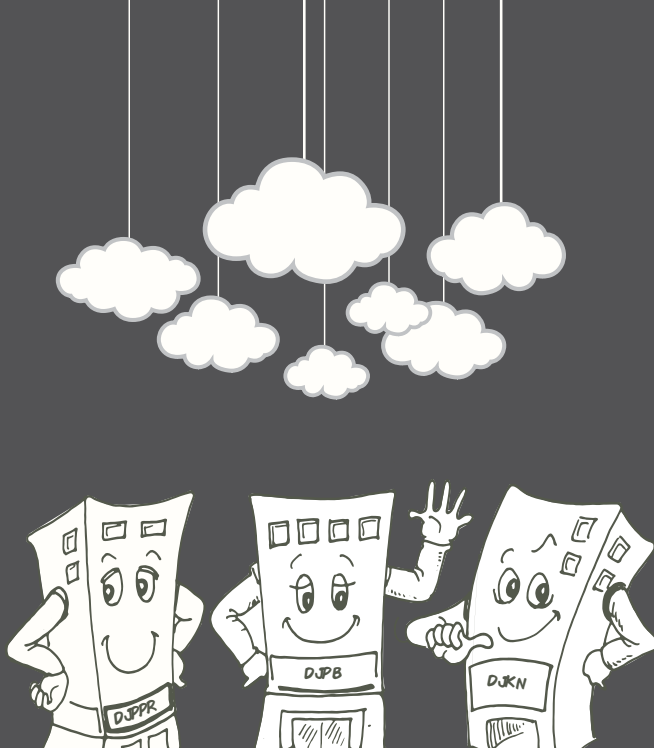


Ini dia peta
Transformasi
Organisasi
pada Tema
Perbendaharaan

Hasil
Leaders
Offside
Meeting
Kemenkeu
tahun 2015



Transformasi Organisasi



- 2015: **Pelayanan Bersama** di 20 lokasi
- 2016:
 - Memperluas **Pelayanan Bersama**
 - Penguatan **Tusi DJKN**
- 2017: **Integrasi IT** untuk layanan bersama
- 2018:
 - Penggabungan **DJPB** dengan **DJPPR**
 - Pembentukan **3 Deputi**
 - **Penyatuan layanan** Kanwil & Kantor Layanan di GKN
- 2023:
 - Penggabungan **DJKN** dengan **unit treasury baru**
 - **Penggabungan struktur** Kanwil

Capaian

s.d.
Maret
2016

- Layanan Bersama (DJKN-DJPB-DJPPR) di 20 lokasi (8 Kanwil DJKN, dan 12 KPKNL).
- Video conference (monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Bersama Tahun 2015).

- Inisiasi integrasi IT Layanan Bersama.
- Upaya penguatan tugas dan fungsi, serta SDM DJKN.

Apa sih yang dimaksud dengan “Pelayanan Bersama (Co-Location)” itu?

Salah satu spirit dari transformasi kelembagaan adalah melakukan efisiensi model pelayanan melalui penyediaan one point of contact bagi para stakeholder. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para stakeholder untuk mengakses jasa layanan yang diberikan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil studi Mc Kinsey DJKN dan DJPB sendiri pada dasarnya melayani stakeholder

yang sama. Sehingga, keberadaan kantor-kantor vertikal DJKN dan DJPB yang tidak dalam satu lokasi (bahkan beberapa berbeda kota), menimbulkan kesulitan bagi para stakeholder untuk menggunakan jasa layanan kekayaan negara dan perbendaharaan, terutama terkait dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dan Laporan Keuangan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian

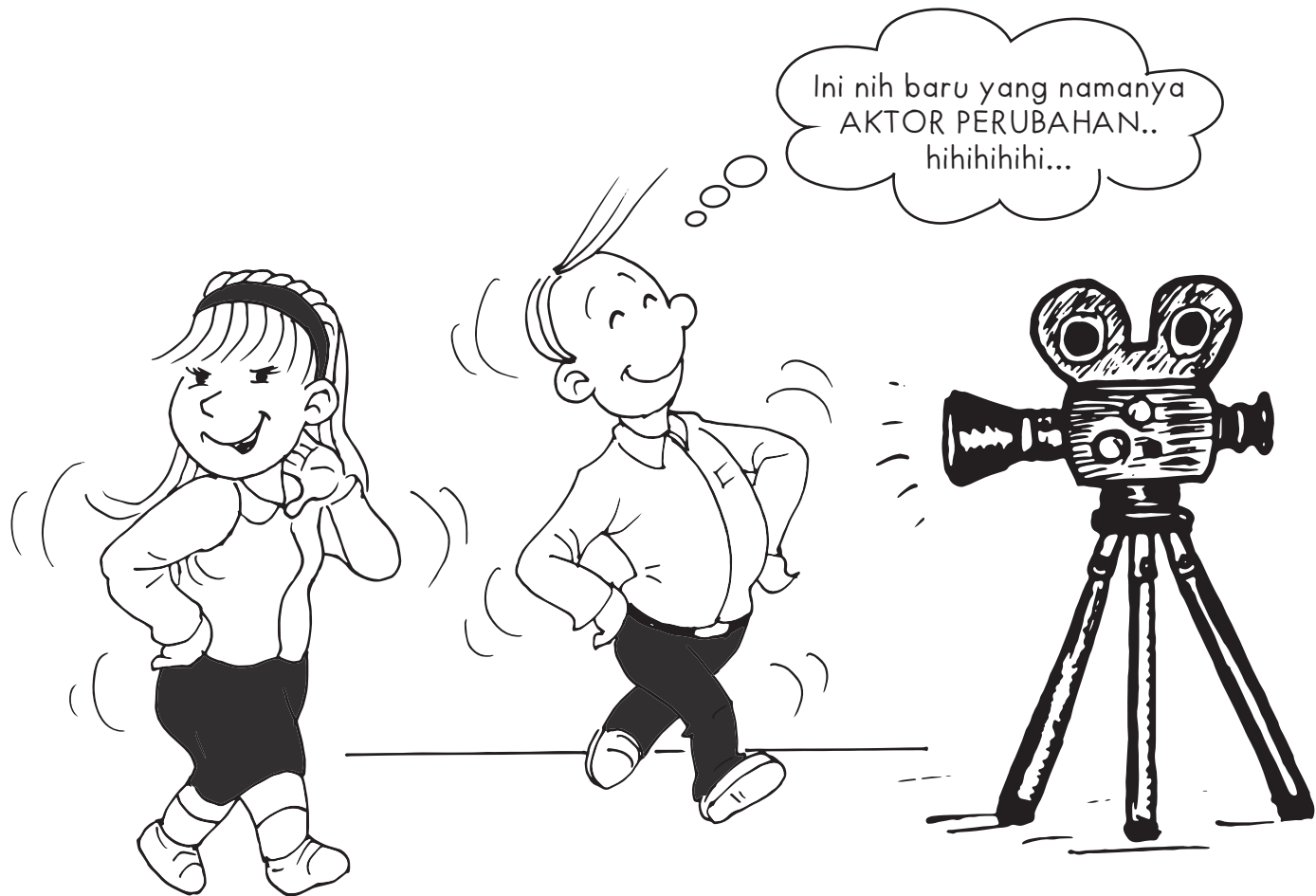
Weleh...
weleh.. Kata
orang ganteng, sebatang
lidi akan sangat mudah
dipatahkan, kumpulan
banyak lidi sangat sulit
dipatahkan..

Adduhhh..
Tiko, yang
ngomong pasti
bukan kamu.. kamu
kan bukan orang
ganteng..
weekkk :P



Keuangan pada awal Tahun 2015 menyelenggarakan mini-labs yang diikuti oleh perwakilan dari DJKN, DJPB, DJPPR, BKF, BPPK, serta CTO sebagai moderator acara.

Dari pelaksanaan mini labs tersebut, diusulkan bagi ketiga unit eselon I yang menjalankan fungsi treasury untuk melakukan pelayanan bersama dalam satu lokasi atau istilah yang kita kenal sekarang, yaitu Pelayanan Bersama (co-location).

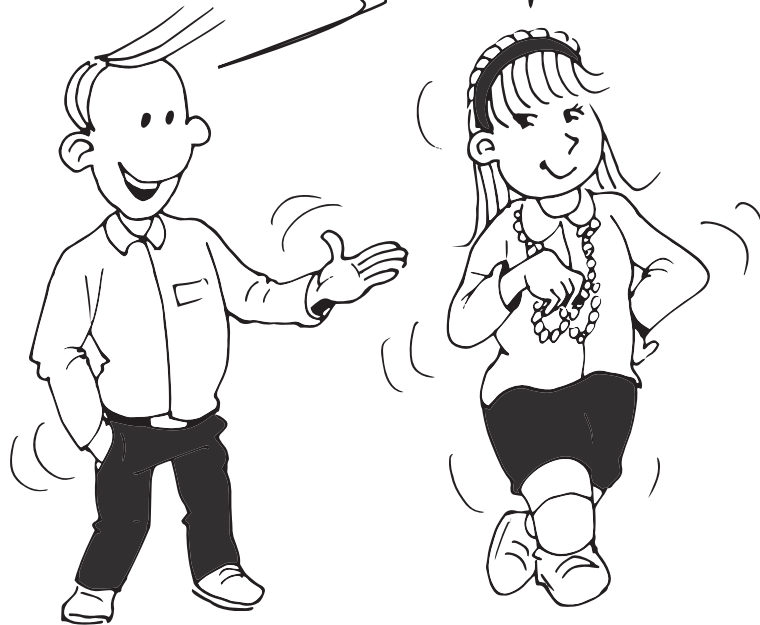


#4

PENGELOLA TRANSFORMASI

sekarang kamu udah ngerti banyak hal tentang Transformasi Kelembagaan Kemenkeu kan.. Tapi jangan sombong dulu, kamu belum tau kan siapa yang mengkoordinir pelaksanaan semua program tersebut?? Yuk kita cari tau

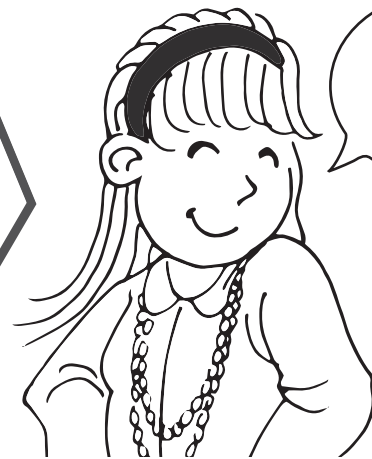
Nyari taunya **KEMANA** Tiko ??



Ke hatimu.. :P

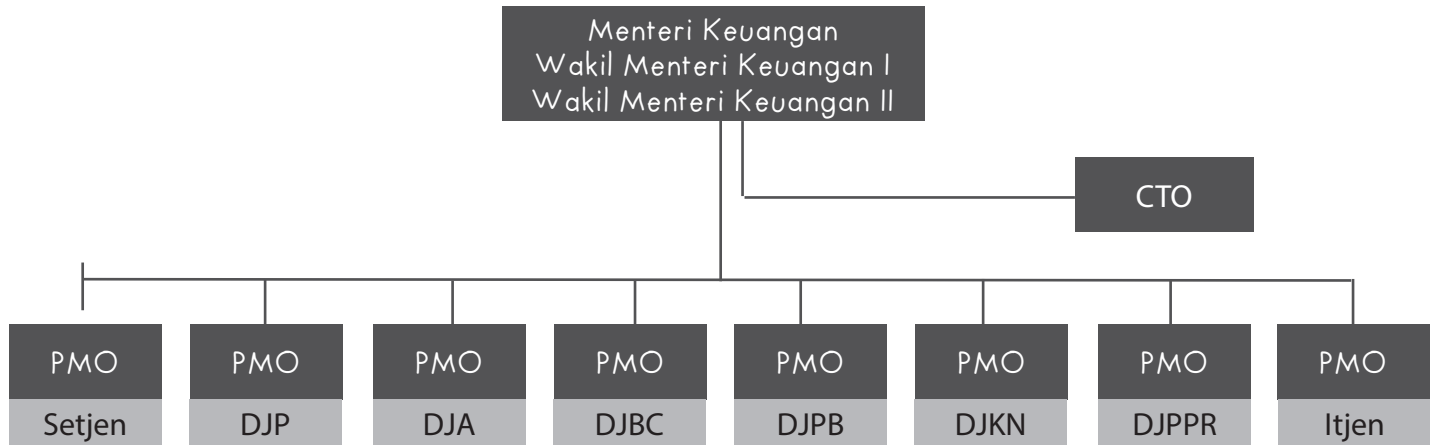


mihhi... jadi malu.. Modus ah kamu..



SIAPAKAH PIHAK YANG MENGELOLA PROGRAM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN?

Sebuah unit kerja yang biasa dikenal sebagai Transformation Office merupakan unit yang akan melaporkan pada pimpinan tertinggi dari suatu organisasi dan bertanggung jawab untuk mendorong kemajuan secara sistematis untuk meraih hasil di area-area prioritas yang sudah dijabarkan bersama dengan para pimpinan tertinggi. Di lingkup Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, telah dibentuk Central Transformation Office (CTO) dan Project Management Office (PMO). Kedua unit tersebut bertanggung jawab dalam mendukung dan mengoordinasikan implementasi Inisiatif Strategis.



* CTO : Central Transformation Office
PMO : Project Management Office

CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE

APA SAJA SIH PERAN CTO?

CTO dibentuk dengan garis pelaporan langsung ke Menteri Keuangan dan akan memberi dukungan implementasi langsung secara ringan (light touch), dalam arti CTO utamanya akan memainkan fungsi pendukung dan pemberi kemudahan (enabler). Namun demikian, kesuksesan CTO akan ditentukan oleh keberhasilan implementasi inisiatif transformasi di seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan pencapaian dampak yang diharapkan di setiap unit Eselon I

LANTAS, APA SIH YANG DILAKUKAN OLEH CTO?

1 Complexity Management

atau pengelolaan kompleksitas yang meliputi tidak hanya pemantauan dan monitoring hasil, namun juga memastikan isu yang tepat mendapatkan perhatian dan arahan para pimpinan tertinggi.

2 Change Management

atau pengelolaan perubahan akan memberikan informasi kepada para stakeholder saat diperlukan, serta melibatkan dan memotivasi para pegawai di seluruh jajaran organisasi

3 Content Expertise

jika diperlukan - memberikan analitik terfokus dan pengetahuan terhadap suatu bidang untuk mengatasi isu tertentu yang timbul, serta mengumpulkan dan membagi best-practice atau kesuksesan kepada seluruh tim implementasi

4 Melaksanakan inisiatif tingkat Kemenkeu berprioritas tinggi dan kompleks jika diperlukan - desain CTO termasuk sebuah mandat dan dukungan sumber daya untuk Transisi Organisasi untuk keseluruhan perubahan struktur Organisasi Kemenkeu

PROJECT MANAGEMENT OFFICE

APA SAJA SIH PERAN PMO?

Di dalam tiap unit Eselon I, PMO dibentuk dan akan melaporkan langsung ke Direktur Jenderal. dan Menteri Keuangan. PMO akan bertanggung jawab untuk mendukung dan mengkoordinasikan implementasi Inisiatif-inisiatif Transformasi di masing-masing unit Eselon I. .

Singkat kata, peran PMO adalah sebagai katalis untuk mendukung lancarnya implementasi program, sedangkan eksekusi atas berhasil atau tidaknya program transformasi organisasi berada pada unit teknis terkait.

LANTAS, APA SIH YANG DILAKUKAN OLEH CTO?

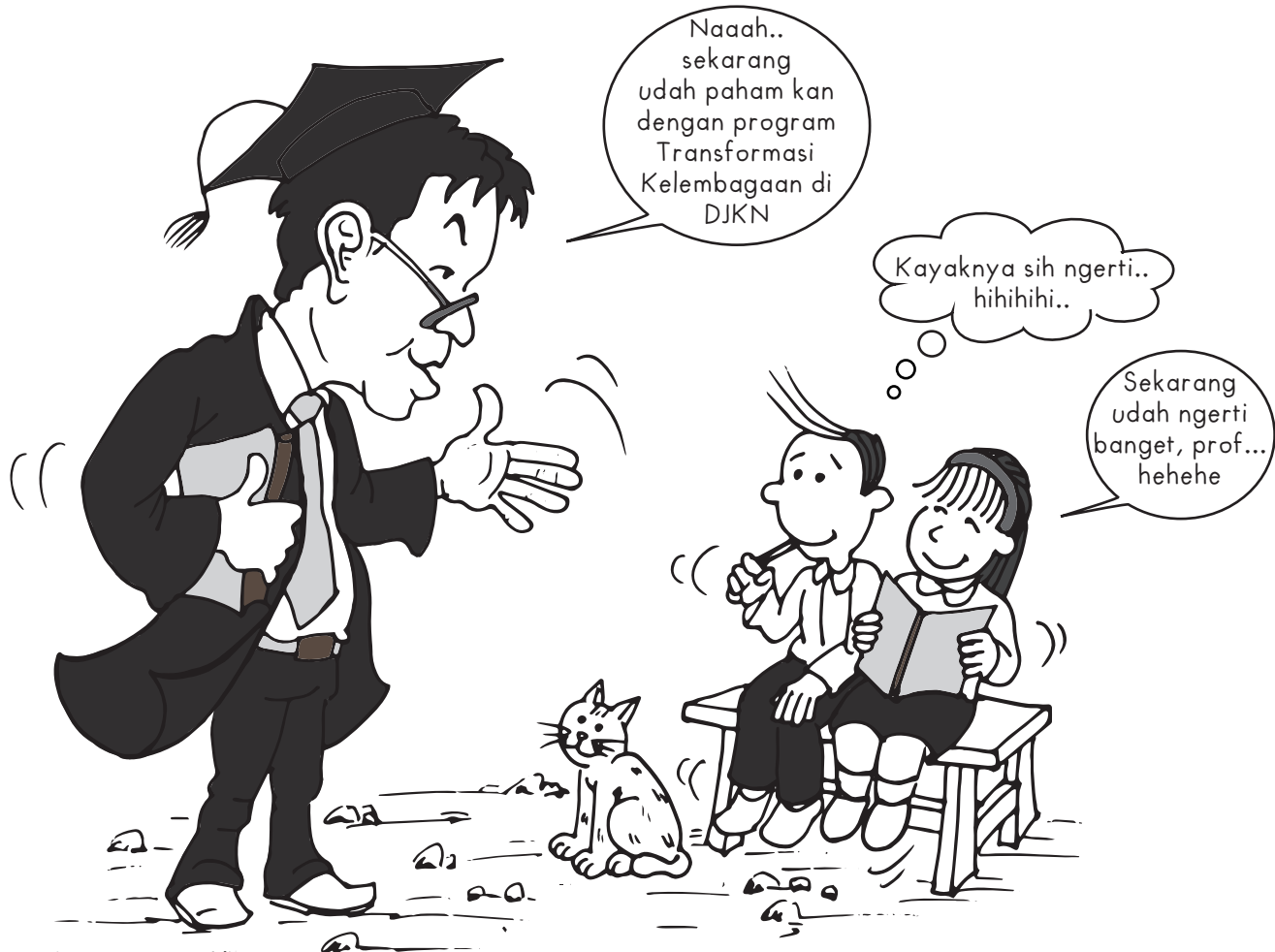
1 Complexity Management

PMO menjadi pusat pengumpulan data dan melakukan monitoring terhadap status dan dampak seluruh inisiatif di dalam masing-masing unit Eselon I. PMO juga akan memberi dukungan bagi unit teknis untuk memecahkan masalah yang berat dalam proses implementasi inisiatif transformasi.

2 Change Management

atau menjaga motivasi dan meningkatkan keterlibatan pegawai dalam pelaksanaan program transformasi organisasi.

3 Content Expertise jika diperlukan, yaitu memberikan keahlian atas bidang tertentu untuk mendukung upaya pemecahan masalah atau implementasi.

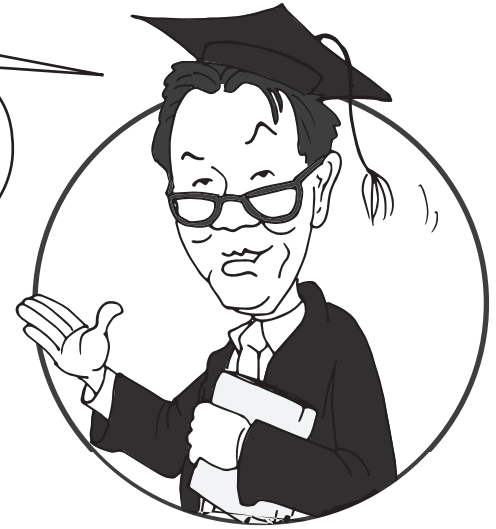


Naah..
sekarang
udah paham kan
dengan program
Transformasi
Kelembagaan di
DJKN

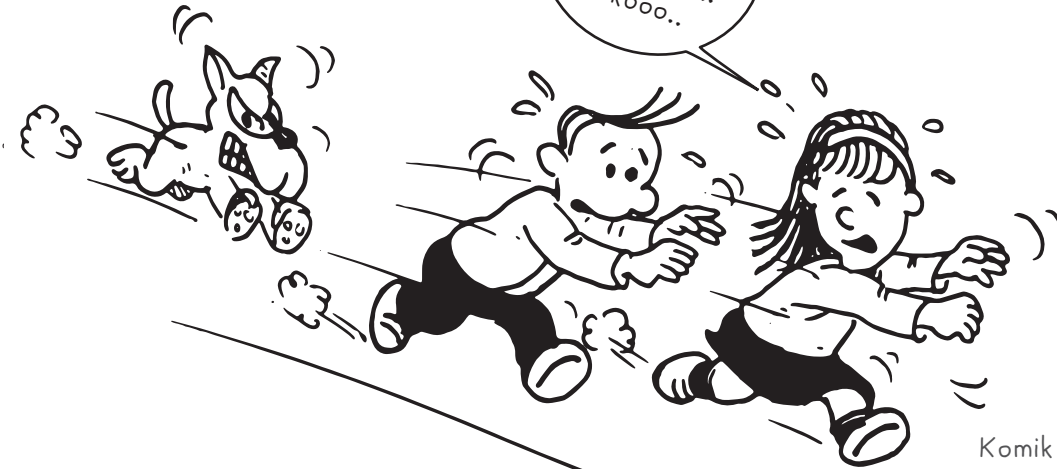
Kayaknya sih ngerti..
hihihihi..

Sekarang
udah ngerti
banget, prof...
hehehe

Dalam menghadapi transformasi ini kita memang harus gerak cepat. Secepat Tika dan Tiko sekarang.. hohoho



Ayo.. cepaat.. larinya yang cepaaat.. Tikoo..



TIM KREATIF

Pengarah | Rahayu Puspasari

Supervisor | Adi Wibowo

Ilustrator gambar | Hendrawan Yudie Susanto

Script & Graphic designer | Fajar Adriansyah

Materi | Tim PMO DJKN

Reviewer | Dewi Indrias Ayuni

| Tiar Nurita Qadarsih

| Kresna N. Fadhila

| Deta Novian AP

| M. Irsyad Tattaqun

| Hamid Andra

KN'ERS!
PLEASE
GET CLOSER
TO US



www.djkn.kemenkeu.go.id/pmo



Google Playstore (Android):
"Transformasi
Kelembagaan DJKN"



www.radio.djkn.or.id



pmo.djkn@kemenkeu.go.id

a product of :

